

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kehancuran Enron Corporation sebagai salah satu perusahaan raksasa dunia yang terjadi pada tahun 2001 menyadarkan banyak pihak akan pentingnya *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan. Berdasarkan lembaga penelitian Committee on Governmental affair Amerika Serikat (2002), yang telah melakukan analisis pada kejatuhan Enron mendapati bahwa *Good Corporate Governance* pada Enron Corp. tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di Indonesia, isu mengenai *corporate governance* muncul setelah terjadinya krisis multidimensi pada pertengahan 1997. Krisis ini dimulai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kemudian menghancurkan sendi sendi ekonomi, salah satunya adalah pada sektor perbankan. Menurut hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB (*Asia Development Bank*), krisis yang terjadi di Indonesia dan runtuhnya perusahaan-perusahaan besar dunia adalah disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan *good corporate governance*.

Selain itu, krisis ekonomi yang diawali oleh jatuhnya perusahaan raksasa Amerika Serikat seperti Lehman Brothers dan Merrill Lynch pada tahun 2008, memberikan Efek luar biasa pada Negara–Negara Eropa dan Asia sehingga menimbulkan krisis

ekonomi global. Yang kemudian krisis ekonomi global ini sangat dirasakan oleh Negara dunia ketiga karena memiliki ketergantungan yang tinggi pada Negara–Negara yang perekonomiannya kuat seperti Amerika. Sebagaimana diungkapkan oleh Baird (2000) bahwa salah satu penyebab timbulnya krisis ini adalah buruknya pelaksanaan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan rendahnya transparansi di lingkungan bisnis perusahaan di hampir seluruh perusahaan baik BUMN maupun perusahaan swasta. Untuk itu langkah penting yang dapat dijadikan kekuatan internal dengan menerapkan CG untuk mengurangi dampak krisis eksternal.

Sebagaimana dijelaskan bahwa *Corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001). Sehingga seharusnya sangat di harapkannya suatu hubungan yang sinergis dan transparan antara eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham).

Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG (2006) di Indonesia. KNKG mengemukakan bahwa pedoman *good corporate governance* yang mereka susun antara lain bertujuan untuk “*mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya,*” (butir 5)

serta untuk “*meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan*” (butir 6) .

Dey Report (1994) dalam Labelle (2002) mengemukakan bahwa *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Sehingga pada dasarnya *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dapat mengidentifikasi dan menyelaraskan kepentingan dalam perusahaan, dimana hak dan kepentingan masing–masing pemangku kepentingan dapat terarah, terkendali dan berada pada jalurnya.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

Manajemen sebagai pihak pengelola memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan dampaknya terhadap kondisi perusahaan. Bagi perusahaan publik, laporan keuangan merupakan perangkat utama yang digunakan manajemen dalam menyampaikan informasi tersebut. Laporan keuangan dinilai

sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen. Dalam hal ini, manajemen dihadapkan pada keputusan mengenai tingkat pengungkapan informasi bagi *stakeholders* (Kusumawati dan Riyanto, 2006).

Labelle dalam Kusumawati (2006) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan praktik *corporate governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan praktik *corporate governance* kemungkinan tidak sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *financial disclosure*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *corporate governance*, yaitu faktor karakteristik spesifik perusahaan dan faktor *corporate governance* itu sendiri. Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan menunjukkan hasil yang beragam. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

Penelitian ini adalah merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rini (2010). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mencakup variabel penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen besaran perusahaan, umur *listing*, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan kepemilikan saham dispersi, ukuran perusahaan, umur operasi perusahaan dan kualitas audit sebagai variabel independen.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*”

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan saham dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
3. Apakah umur listing perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang masih terdaftar dan aktif di BEI pada tahun 2011-2013
2. Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini adalah meliputi kepemilikan saham dispersi, ukuran perusahaan, umur listing perusahaan dan kualitas audit yang tercatat dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang bersangkutan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan saham dispersi pada luas pengungkapan *Corporate Governance*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan pada luas pengungkapan *Corporate Governance*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh umur listing perusahaan pada luas pengungkapan *Corporate Governance*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas audit pada luas pengungkapan *Corporate Governance*.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan informasi tambahan mengenai pentingnya penerapan dan pengungkapan *corporate governance*.
2. Bagi calon investor, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi.
3. Bagi calon kreditur, sebagai bahan pertimbangan dalam kaitannya dengan pemberian kredit pada perusahaan.
4. Bagi peneliti berikutnya, sebagai acuan untuk mengembangkan pengungkapan *corporate governance* secara lebih luas dan mendalam.